

BABI PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga salah satu keluaran dari perencanaan adalah penganggaran. Selanjutnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, SPPN adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Peran serta masyarakat dalam perencanaan dilaksanakan melalui musyawarah perencanaan pembangunan, yang akan menghasilkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan yang memuat arah dan tujuan pembangunan yang akan dicapai selama periode satu tahun, dengan kontribusi dari seluruh sumber dana yaitu APBN/PHLN, APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota, swadaya masyarakat, swasta serta sumber lainnya. Sebagai implementasi dari kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan selama periode satu tahun, perlu mendapat dukungan penganggarnya. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam Kebijakan Umum APBD (KU-APBD), dengan sumber penganggaran dari APBD Kabupaten sebagai acuan dalam penyusunan PPAS dan RAPBD.

Selanjutnya penyusunan KU-APBD Kabupaten Natuna Tahun 2016 dilaksanakan dalam rangka menyediakan suatu pedoman dan atau petunjuk untuk kegiatan penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai suatu kebijakan pada tingkat operasional yang bersifat penjabaran dan mediasi tahunan. Dalam kapasitasnya sebagai mediasi, KU-

APBD 2016 memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, penyusunan KU-APBD 2016 tetap mempertimbangkan kondisi Kabupaten Natuna dan kinerja APBD Tahun 2016 serta kemampuan nyata keuangan daerah, disamping mempertimbangkan kebutuhan yang berkembang secara sektoral di masyarakat yang diwadahi melalui penjangkauan aspirasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Implementasi KU-APBD 2016 melalui RAPBD 2016 diharapkan dapat menjabarkan fungsi-fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi.

Selain itu, KU-APBD 2016 diarahkan pula pada upaya mendorong perekonomian daerah melalui kegiatan yang dilaksanakan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kegiatan penyediaan dan penanganan prasarana dasar, seperti infrastruktur permukiman dan fasilitas umum, perluasan lapangan kerja, penciptaan rasa aman dan ketertiban. Diharapkan kegiatan-kegiatan dapat menciptakan situasi kondusif bagi perekonomian daerah serta peningkatan pendapatan masyarakat.

Kebijakan Umum APBD Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2016 memuat program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintahan daerah yang disertai dengan proyeksi perencanaan pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang disertai dengan asumsi yang mendasarinya.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN

Dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016, dimaksudkan sebagai penjabaran skenario rencana pembangunan tahunan daerah yang telah dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna tahun 2016.

Tujuan penyusunan KU-APBD Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Natuna Tahun 2016.
2. Kerangka kebijakan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Natuna Tahun 2016.
3. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada Tahun 2016 agar berdayaguna dan berhasilguna.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 DASAR HUKUM

Penyusunan KU-APBD Tahun Anggaran 2016, berpedoman pada peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang (RPJP) Nasional;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
10. Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
15. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
16. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016;
22. Peraturan Bupati Natuna Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016;
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016.

KU-APBD selanjutnya dituangkan dalam bentuk nota kesepakatanantara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal ini bertujuan sebagai berikut :

- (1) Kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD tentang dasar Penyusunan RAPBD;
- (2) Kesamaan rencana tindak dalam pengalokasian anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Keserasian dan keselarasan penyaluran aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan sumberdaya daerah, asumsi makro ekonomi.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 PERKEMBANGAN INDIKATOR EKONOMI MAKRO

Pembangunan yang dilaksanakan dari waktu ke waktu merupakan suatu proses untuk mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik, aman, tentram, sejahtera dan demokratis. Gambaran hasil pembangunan daerah yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, atau disebut pula kinerja pembangunan daerah, dapat dilihat dari beberapa indikator makro ekonomi yang merupakan dasar penilaian keberhasilan program prioritas yang telah ditetapkan dalam agenda pembangunan daerah. Indikator makro ekonomi yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan ekonomi diukur dari kenaikan pendapatan nasional yang tercermin pada nilai PDRB dari tahun ke tahun. Indikator yang lazim digunakan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi riil adalah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan yang menjadi petunjuk dari kinerja perekonomian secara umum sebagai ukuran kemajuan suatu daerah.

Indikator umum yang digunakan untuk mengetahui pencapaian keberhasilan percepatan pembangunan di suatu wilayah pada waktu tertentu adalah laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator makro ekonomi yang dapat menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam suatu wilayah pada suatu periode tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi baik secara agregat maupun sektoral dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan, bukan atas dasar harga berlaku. PDRB atas dasar harga berlaku belum menggambarkan kenaikan atau pertumbuhan yang riil, karena masih dipengaruhi kenaikan tingkat harga atau inflasi.

Angka pertumbuhan ekonomi tahun 2013 (PDRB riil) yang tumbuh 6,60 persen, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,54 persen. Kinerja ekonomi Kabupaten Natuna

sepanjang 2013 menunjukkan hasil yang cukup baik. Dengan target dari RPJM Nasional pertumbuhan PDRB sebesar 6,80 persen pada tahun 2014, hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah Kabupaten Natuna untuk menaikan pertumbuhan PDRB sebesar 0,20 persen pada tahun 2014 sehingga capaian target yang diinginkan pada RPJM Nasional pada tahun 2014 dapat tercapai.

Pada tahun 2013 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Natuna masih dominan sebesar 55,31 persen. Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2013 menurun dari tahun sebelumnya (2012) sebesar 58,12 persen. Sektor perdagangan, hotel dan restoran selama tahun 2013 juga mampu memberi kontribusi sebesar 16,85 persen, atau mengalami kenaikan dari pada tahun sebelumnya berkontribusi sebesar 15,96 persen.

2. Tingkat inflasi

Penurunan atau kenaikan nilai tukar uang dalam periode tertentu terhadap barang dan jasa di suatu wilayah digambarkan oleh angka inflasi/deflasi. Angka inflasi/deflasi merupakan turunan dari angka indeks harga, baik indeks harga konsumen (IHK) maupun indeks harga produsen (IHP). Perubahan kedua indeks tersebut dalam kurun waktu tertentu menunjukkan besarnya laju inflasi yang terjadi. Salah satu indikator ekonomi yang cukup penting dan mempunyai pengaruh langsung kepada masyarakat adalah Inflasi. Jika inflasi terlalu tinggi maka daya beli masyarakat akan menurun yang akan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Secara umum laju inflasi nasional Januari 2014 sebesar 1,07 persen. Pada Bulan Januari 2014 di Kabupaten Natuna terjadi inflasi sebesar 1,34 persen. Selain itu kota-kota lainnya di Propinsi Kepulauan Riau juga mengalami inflasi yaitu Kota Batam sebesar 0,73 persen dan kota Tanjungpinang sebesar 1,26 persen

Inflasi di Kabupaten Natuna disebabkan oleh enam kelompok pengeluaran mengalami inflasi yaitu kelompok bahan makanan yaitu sebesar 2,92 persen; dan kelompok makanan jadi, minuman dan tembakau sebesar 0,36 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar sebesar 0,99

persen; kelompok sandang sebesar 0,88 persen; kelompok kesehatan sebesar 0,62 persen; dan kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,41 persen. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi yaitu kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar -0,14 persen. Laju inflasi tahun kalender Januari 2014 di Kabupaten Natuna sebesar 1,34 persen.

Laju inflasi "year on year" bulan Januari 2014 dibanding Januari 2013 di Kabupaten Natuna sebesar 8,73 persen.

3. Tingkat Pengangguran

a. Kependudukan

Pertumbuhan penduduk yang cukup besar akan menyebabkan meningkatnya jumlah angkatan kerja yang ada. Hal ini kemudian membawa dampak semakin besarnya jumlah orang yang mencari pekerjaan ataupun jumlah orang yang menganggur.

Masalah kependudukan memiliki posisi penting bagi pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan sebagai penentu kebijakan, perencanaan pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi pemerintah maupun swasta. Sebagai daerah yang sedang membangun aspek kependudukan bersifat dinamis dan akan terus mengalami perubahan. Pembangunan berbagai sektor berdampak pada perkembangan jumlah penduduk yang relatif pesat.

Sebagai daerah yang sedang membangun, jumlah penduduk Kabupaten Natuna tahun 2013 berjumlah 76.897 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki berjumlah 39.830 (51,80%) dan penduduk perempuan berjumlah 37.067 (48,20%) dengan laju pertumbuhan pertahun 5,69 persen. Secara keseluruhan kepadatan penduduk Kabupaten Natuna tahun 2013 sebesar 38,42 jiwa per km². Ini artinya dalam wilayah seluas 1 km² terdapat penduduk sekitar 38 jiwa. Kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi adalah Kecamatan Midai sebesar 213,79 jiwa per km² dan wilayah yang memiliki kepadatan

penduduk rendah adalah Kecamatan Bunguran Utara sebesar 10,51 jiwa per km².

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbesar adalah kecamatan Bunguran Timur dengan jumlah penduduk 25.408 jiwa dan yang terkecil adalah penduduk kecamatan Pulau Laut sebesar 2.417 jiwa.

Tabel. 1.
Tabel Perkembangan Indikator Kependudukan
Kabupaten Natuna Tahun 2013

Kecamatan <i>Subdistrict</i>	Luas (Km ²) <i>Area</i>	Jumlah Penduduk <i>Population</i>	Kepadatan Penduduk <i>Population Density</i>
1. Midai	26,10	5.580	213,79
2. Bunguran Barat	448,46	12.139	27,07
3. Bunguran Utara	404,71	4.254	10,51
4. Pulau Laut	37,69	2.417	64,13
5. Pulau Tiga	67,87	5.378	79,24
6. Bunguran Timur	146,83	25.408	173,04
7. Bunguran Timur Laut	235,01	4.799	20,42
8. Bunguran Tengah	172,71	3.158	18,28
9. Bunguran Selatan	233,99	2.827	12,08
10. Serasan	43,65	5.022	115,05
11. Subi	160,93	2.872	17,85
12. Serasan Timur	23,35	3.043	130,32
Jumlah	2001,30	76.897	38,42

Sumber : Natuna dalam angka Tahun 2014

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang, hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Untuk mengatasi itu perlu dilakukan penyerapan tenaga kerja semaksimal mungkin.

b. Kesempatan Kerja

Pada tahun 2013 yang menjadi leading sektor bukan sektor pertanian lagi, tetapi beralih ke sektor jasa-jasa. Sekarang sektor jasa-jasa diproyeksi menjadi primadona dalam menyerap tenaga kerja terbesar dan penyumbang persentase tertinggi. Sektor jasa-jasa menjadi tumpuan sebagian besar penduduk Kabupaten Natuna terhadap peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan penduduk yang mencapai 9.937 orang (30,14%), sedangkan untuk sektor pertanian pada tahun 2012 mengalami penurunan menjadi 8.528 orang (25,87%). Kemudian diikuti oleh sektor bangunan dengan jumlah 4.989 orang (15,13%). Sementara itu sektor perdagangan, hotel dan restoran sebanyak 4.743 orang (14,38%), dan diikuti sektor lainnya seperti yang tertera pada Tabel. 2 sebagai berikut :

Tabel. 2.
Penduduk 15 tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2013 Di Kabupaten Natuna

Uraian <i>Description</i>	Laki-laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	79,27	20,73	27,32
2. Pertambangan dan Penggalian	59,30	40,70	2,65
3. Industri Pengolahan	52,34	47,66	5,85
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	100,00	0	0,27
5. Bangunan/Konstruksi	100,00	0	8,31
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	49,20	50,80	15,23
7. Pengangkutan dan Komunikasi	90,32	9,68	5,39
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	-	-	-
9. Jasa-Jasa	54,60	45,40	34,17
10. Lainnya	100,00	0	0,81
Jumlah Total	66,70	33,30	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

c. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Tujuan pembangunan adalah mencapai kehidupan masyarakat yang lebih baik. Indikator yang dapat menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian dari tujuan pembangunan tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hasil perhitungan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Natuna pada tahun 2013 sebesar 72,25 sedangkan diperkirakan untuk tahun 2014 meningkat menjadi 72,30. Peningkatan ini dapat dilihat dari komponen Pengeluaran Per kapita dan angka harapan hidup (Tabel.3).

Tabel. 3.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008-2013
di Kabupaten Natuna

Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Angka Harapan Hidup (Tahun)	68,10	68,21	68,31	68,37	68,43	68,57
Angka Melek Huruf (%)	95,75	95,92	96,47	96,63	96,82	97,22
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6,9	6,93	7,17	7,64	7,78	7,94
Pengeluaran Rata-rata Perkapita (Ribu Rp)	612,75	615,21	616,41	620,14	624,33	626,93
IPM	69,81	70,11	70,56	71,26	71,77	72,25

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Natuna

Peningkatan pembangunan manusia dipengaruhi oleh peningkatan yang terjadi pada 3 (tiga) komponen yakni kesehatan (lamanya hidup), pendidikan serta ekonomi. Ketiga komponen pembentuk IPM telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap keberhasilan pembangunan manusia di Kabupaten Natuna. Secara general, angka melek huruf dari Tahun 2008 hingga Tahun 2013 adalah stabil dengan rata-rata sebesar 97,22. Besaran nilai yang sangat baik tersebut merupakan indikator keberhasilan Program Wajib Belajar 9 tahun dan Program Kejar Paket yang telah signifikan membantu penduduk untuk dapat membaca dan menulis. Diperkirakan persentase melek huruf ini untuk tahun selanjutnya menjadi

lebih baik lagi dengan asumsi kinerja di bidang pendidikan adalah sama seperti tahun sebelumnya. Rata-rata lama sekolah masyarakat di Kabupaten Natuna sebesar 7,94 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Natuna yang berumur 15 tahun keatas belum dapat menamatkan sekolah mereka (formal) hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Dibutuhkan perhatian yang lebih terhadap pencapaian program pendidikan, khususnya program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Idealnya dikatakan berhasil jika minimal rata-rata lama sekolah sebesar 9,0 tahun, dimana penduduk Natuna yang berumur 15 tahun keatas dapat menamatkan sekolah formal hingga ke jenjang menengah pertama. Namun pemerintah tetap optimis pada tahun selanjutnya angka ini akan meningkat dan membaik.

Kecilnya peningkatan rata-rata lama sekolah ini dikarenakan perkembangan penduduk migran yang cukup tinggi dimana umumnya para migran tersebut memiliki tingkat pendidikan yang rendah dengan motif mencari pekerjaan. Disamping itu, indikator angka rata-rata sekolah memiliki sifat yang kurang responsif terhadap perubahan jangka pendek, dan hanya mampu menangkap perubahan yang terjadi pada periode yang cukup lama. Pencapaian pembangunan kesehatan dapat dilihat melalui indikator usia harapan hidup masyarakat sebagai komponen penyusun IPM untuk aspek kesehatan. Selama periode 2008-2013, terjadi peningkatan usia rata-rata hidup masyarakat setiap tahunnya, dan usia harapan hidup pada tahun 2013 adalah 68,57.

Peningkatan merepresentasikan perkembangan kesehatan masyarakat sebagai hasil dari berbagai program kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah seperti pelayanan kesehatan gratis, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan ketersediaan obat dan lain sebagainya. Dengan mempertahankan kinerja seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu dengan tetap melakukan perbaikan dan penetapan standar kesehatan yang lebih baik, maka diperkirakan usia rata-rata lama hidup masyarakat Kabupaten Natuna pada tahun yang akan datang terus meningkat kearah yang lebih baik.

2.2 RENCANA TARGET EKONOMI MAKRO TAHUN 2016.

Ekonomi Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 dalam konteks makro regional, dengan memperhatikan latar belakang kondisi ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya maupun kondisi umum perekonomian Nasional dan Regional Provinsi Kepulauan Riau diestimasikan masih mampu berkembang dan tumbuh secara dinamis dalam kerangka pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi dari dampak krisis keuangan global yang berimbas pada berbagai negara termasuk kawasan Asia. Kondisi ini memerlukan sikap hati-hati dan sedikit konservatif terhadap permasalahan sektor riil dan imbasnya terhadap kelompok masyarakat miskin.

Perkembangan ekonomi nasional akan berimbas secara langsung maupun tidak langsung pada kinerja ekonomi daerah, khususnya Kabupaten Natuna Tahun 2016. Laju inflasi akan mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan laju inflasi ekonomi nasional dan regional Provinsi Kepulauan Riau, sehingga perlu adanya kebijakan khusus untuk menjaga stabilitas harga.

Tabel. 4
Target Ekonomi Makro Kabupaten Natuna TA. 2016

No	Indikator	2014	2015	2016
1	PDRB ADHB (jutaan rupiah)	1.941.574,00	2.189.124,685	2.468.238,08
2	PDRB ADHK (jutaan rupiah)	552.530,00	685.626,547	620.705,57
3	LPE	6,07%	6,13 %	6,19 %
4	PDRB Perkapita ADHB (rupiah)	26.426.759	29.203.905	32.272.987
5	PDRB perkapita ADHK (rupiah)	7.520.482	7.812.521	8.115.920

Sumber: Badan Pusat Statistik

Kebijakan ekonomi daerah harus mampu ikut meredam gejolak ekonomi sehingga masyarakat memiliki ketahanan untuk

menghadapinya. Proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah harus sejalan dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kondisi dan situasi perekonomian daerah Kabupaten Natuna dan melihat prospek perekonomian tahun 2016 maka Fokus kebijakan perekonomian Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing ekonomi daerah meliputi revitalisasi dan peningkatan produktifitas sektor Perikanan, kelautan, Pertanian, Peternakan dan Perkebunan, dengan dukungan infrastruktur yang memadai;
2. Peningkatan peran Usaha Kecil Menengah dalam pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan berorientasi ekspor serta pengembangan kewirausahaan untuk mendorong daya saing;
3. Peningkatan struktur perekonomian daerah melalui pengembangan potensi dan produk unggulan daerah yang berorientasi pasar dan memiliki daya saing;
4. Peningkatan kualitas produk sektor perindustrian dan perdagangan melalui pemanfaatan teknologi, kelembagaan dan sarana prasarana pendukung;
5. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi melalui pembangunan jalan dan jembatan, pemeliharaan kondisi jalan dan jembatan serta pelebaran jalan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah upaya untuk mendukung program pemerintah pusat dalam mewujudkan program Tol Laut yang menghubungkan wilayah antar kabupaten dan kecamatan di daerah Kabupaten Natun dalam rangka meningkatkan aksesibilitas wilayah untuk mendukung pengembangan dan kemajuan ekonomi;
6. Usaha peningkatan investasi dan akses pasar di setiap kecamatan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil dalam rangka memperluas kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan;

7. Peningkatan kapasitas Pemerintah daerah, meliputi peningkatan partisipasi dan kelembagaan masyarakat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan kelembagaan aparatur.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (RAPBD) KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2016

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2016 memperhatikan berbagai kondisi, baik lokal maupun nasional, yang diperkirakan akan mempengaruhi besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016. Kondisi tersebut akan menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Natuna Tahun 2016.

Dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Natuna tetap mendukung program "**NAWACITA**" sebagai wujud pembangunan nasional tahun 2016. Unsur-unsur pokok dalam Nawacita tersebut adalah :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

3.1 ASUMSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NASIONAL (APBN)

a. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2015 diperkirakan 5,8 persen akibat adanya tekanan pada kinerja perdagangan internasional, sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi turun menjadi 5,7 persen. Pertumbuhan ekonomi tersebut diupayakan melalui peningkatan pertumbuhan konsumsi masyarakat dan pemerintah serta kinerja investasi. Sumber utama penopang pertumbuhan ekonomi tahun 2016 adalah konsumsi rumah tangga, dikarenakan kinerja konsumsi rumah tangga masih didasari pada binus demografi dan peningkatan kelompok masyarakat pendapatan menengah. Investasi diperkirakan masih meningkat walaupun dalam tingkat yang masih relatif rendah. Kinerja Ekspor merupakan komponen penyusun PDB yang mengalami tekanan paling berat. Walaupun ada penurunan tetapi diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penyesuaian ke arah pertumbuhan yang berkelanjutan dan jangka panjang.

Tabel.5

Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2015

PENGELUARAN	TAHUN 2015 (%)
Konsumsi Masyarakat	5,1
Konsumsi Pemerintah	4,5
PMTB (Investasi)	8,5
Ekspor	2,2
Dikurangi Impor	1,6
PDB	5,7

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Pada Tahun 2015, Konsumsi masyarakat diperkirakan tumbuh sebesar 5,1 persen sama dengan konsumsi tahun 2014 sebesar 5,1 persen. Dengan adanya pelaksanaan pemilu serentak pada akhir tahun 2015 diharapkan berlangsung kondusif serta stabilitas harga yang menjadi daya beli masyarakat tetap terjangkau sehingga diharapkan konsumsi rumah tangga masih meningkat. Selain hasil dari kebijakan untuk menjaga laju inflasi, dampak dari pelaksanaan kegiatan kampanye dan pemilu legislatif telah memberikan dorongan tambahan bagi kegiatan konsumsi rumah tangga. Relatif stabilnya laju inflasi diharapkan mampu menjaga daya beli masyarakat sehingga menjadi pendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat. Laju pertumbuhan konsumsi rumah tangga di 2015 diharapkan tetap pada 5,1 persen, walaupun masih terdapat berbagai resiko tekanan dan kondisi yang kurang meyakinkan, akan tetapi dengan adanya pemilu serentak, juga adanya bonus demografi dan peningkatan kalangan masyarakat pendapatan kelas menengah akan memberikan landasan yang kuat bagi pertumbuhan konsumsi rumah tangga. Indikator lain seperti Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga memberikan sinyal masih kuatnya konsumsi masyarakat. Beberapa upaya pengendalian harga akan terus dilakukan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat.

Konsumsi pemerintah dalam APBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar 4,5 persen. Konsumsi pemerintah tersebut dipengaruhi dari beberapa kebijakan realokasi belanja-belanja yang kurang produktif seperti belanja perjalanan dinas, dan paket rapat/konsinyering ke belanja yang lebih produktif seperti belanja infrastruktur dan dukungan belanja pada program-program kesejahteraan sosial.

Pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di tahun 2014 sebesar 4,1 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2013 yang sebesar 5,3 persen. Ketatnya likuiditas global dan tingginya suku bunga perbankan masih menjadi kendala dalam peningkatan aktivitas investasi. Penyelenggaraan pemilu juga menjadi alasan bagi para investor untuk bersikap menunggu terhadap rencana investasinya. Disisi lain, tekanan pada

nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga menyebabkan biaya impor untuk barang modal mengalami peningkatan yang juga berdampak pada kinerja investasi.

Diawal tahun 2015, aktivitas investasi diharapkan kembali meningkat seiring dengan program pemerintahan baru yang menekankan pada perbaikan sisi penawaran dari perekonomian melalui insfrastruktur sehingga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi. Dalam APBNP tahun 2015, PMTB diperkirakan tumbuh sebesar 8,5 persen dengan berbagai upaya yang akan dilakukan pemerintah, antara lain realokasi belanja degan meningkatkan porsi belanja insfrastruktur, pemangkasan jalur izin usaha serta investasi melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor impor di tahun 2014 fluktuasi. Kinerja ekspor mengalami perlambatan pertumbuhan menjadi 1,0 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 4,2 persen. Sementara itu kinerja impor sedikit menguat menjadi 2,2 persen jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun sebelumnya yang sebesar 1,9 persen. Masih melambatnya ekonomi global dan volume perdagangan dunia serta negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok dan Jepang menjadi faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekspor impor Indonesia. Selain itu faktor internal berupa kebijakan pembatasan ekspor mineral juga menjadikan kinerja ekspor mengalami perlambatan sejak awal tahun 2014. Disisi lain peningkatan pertumbuhan impor disebabkan terjadinya kenaikan impor barang nonmigas.

Pertumbuhan ekspor impor dalam APBNP tahun 2015 diperkirakan sebesar 2,2 persen dan 1,6 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi global dan volume perdagangan dunia diharapkan akan mendorong kinerja ekspor Indonesia, walaupun ada tekanan penurunan harga komoditas global. Pemerintah berupaya untuk terus mendukung kinerja ekspor melalui upaya perbaikan struktur ekspor dari ekspor berbasis komoditas menjadi berbasis manufaktur, yaitu pengembangan produk ekspor olahan nonmigas dan jasa

yag bernilai tambah tinggi dan kompetitif dipasr internasional. Disamping itu perkembangan global dan rantai nilai regional memberikan peluang bagi pengusaha Indonesia untuk berpartisipasi yang sekaligus dapat meningkatkan diversifikasi akses pasar ekspor bagi produk manufaktur nasional. Kinerja impor diharapkan juga akan mengalami peningkatan pada impor non migas, terutama terkait menguatnya perekonomian domestik.

Dari sisi produksi, kinerja semua sektor diperkirakan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran masih menjadi sektor yang diharapkan mampu menjadi pendorong utama pertumbuhan PDB. Sektor pertanian pada tahun 2014 diperkirakan tumbuh sebesar 3,5 persen. Sektor pertanian ditingkatkan dengan memperkuat ketahanan pangan nasional serta meningkatkan produksi berbagai komoditi pangan lainnya, diversifikasi pangan dan stabilisasi harga pangan dalam negeri, serta peningkatan kesejahteraan petani dan nelayan. Sektor Pertanian, meskipun keberhasilannya lebih banyak bergantung pada kondisi cuaca dan alam, namun masih menjadi andalan dalam mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Begitu juga halnya dengan pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan akan terus meningkat sejalan dengan adanya program reindustrialisasi. Pada tahun 2014 pertumbuhan sektor industri pengolahan diperkirakan berada pada kisaran 6,1 persen. Pembangunan industri didorong untuk meningkatkan nilai tambah berbagai komoditi unggulan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya koridor-koridor ekonomi dalam kerangka MP3EI (Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia).

Sektor konstruksi di tahun 2014 diperkirakan tumbuh sebesar 7,0 persen. Pertumbuhan sektor konstruksi didorong oleh berbagai proyek infrastruktur sebagai kelanjutan MP3EI dan merupakan salah satu prioritas nasional. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran di tahun 2014 diperkirakan 7,0 persen. Daya beli masyarakat diharapkan masih tetap

terjaga sehingga mampu menjadi pendorong tumbuh sektor tersebut. Selain itu, kinerja sektor tersebut terkait juga dengan kinerja sektor industri dan impor. Perdagangan ritel, baik yang berupa lokal maupun modern, diperkirakan makin marak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas.

b. Harga dan *Lifting* Minyak

Setelah mengalami peningkatan selama periode tahun 2009-2010, realisasi *lifting* minyak mengalami penurunan pada tahun 2011-2014. Realisasi *lifting* minyak dan gas diperkirakan masih akan berlanjut beberapa tahun ke depan, sementara investor sektor migas di dalam negeri ke depan akan menghadapi tantangan dari eksternal khususnya terkait rendahnya harga minyak dunia dan permasalahan internal seperti perizinan dan tumpang tindih lahan. Namun pemerintah berupaya untuk menahan laju penurunan produksi alamiah dengan melalui upaya-upaya optimalisasi produksi, pemboran sumur baru serta pemanfaatan teknologi *enhanced oil recovery* (EOR)

Berdasarkan perkembangan di atas, asumsi *lifting* minyak dalam APBN 2015 ditetapkan sebesar 900 ribu barel per hari diperkirakan hanya akan terealisasi sebesar 825 ribu barel perhari. Pencapaian tersebut terutama didukung oleh Lapangan Banyu Urip (Blok Cepu) yang diperkirakan mencapai puncak produksi sebesar 165 ribu barel per hari pada tahun 2015. Secara keseluruhan tahun 2015, *lifting* gas bumi diperkirakan mencapai 1.221 ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan asumsi *lifting* gas bumi pada APBN tahun 2015 yang ditetapkan sebesar 1.248 ribu barel setara minyak per hari. Sehingga asumsi *lifting* migas pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 2,05 juta barel setara minyak per hari.

c. Pertumbuhan Penerimaan Pajak

Dalam penyusunan APBNP tahun 2015 pemerintah melakukan berbagai langkah kebijakan fiskal seperti kebijakan di bidang pendapatan Negara, belanja Negara, dan pembiayaan anggaran, strategi dan kebijakan

tersebut untuk meningkatkan pendapatan Negara melalui optimasi pendapatan tanpa mengganggu perkembangan investasi dan dunia usaha. Upaya pemerintah dalam mengamankan target penerimaan pajak tahun 2015 antara lain melalui penggalan potensi penerimaan perpajakan melalui perbaikan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, ekstensifikasi tambahan wajib pajak baru, dan penegakan hukum.

d. Nilai Tukar Rupiah

Pemerintah dan Bank Indonesia terus berupaya menjaga volatilitas nilai tukar rupiah melalui penguatan sinergi kebijakan fiskal dan moneter, penerapan kebijakan moneter yang berhati-hati, pengawasan lalu lintas devisa, serta pengembangan dan pendalaman pasar keuangandomestik. Kebijakan itu diharapkan mampu menjaga stabilitas nilai tukar, mencegah volatilitas yang berlebihan, dan menjaga kecukupan cadangan devisa untuk memenuhi kebutuhan fundamental perekonomian. Penerapan bauran kebijakan makro prudensial seperti melalui penerapan instrumen *term deposit* diharapkan dapat menjaga agar arus modal masuk ke pasar keuangan Indonesia yang masih relatif besar sehingga dapat memberikan nilai manfaat bagi pembangunan ekonomi. Ke depan, tekanan terhadap pergerakan nilai tukar rupiah akan bersumber dari semakin menurunnya surplus neraca perdagangan Indonesia serta perlambatan ekonomi di Cina, India, dan Brazil yang dikhawatirkan akan mengurangi daya tarik arus modal masuk ke negara *emerging market* dan mendorong terjadinya *flight to quality*. Berdasarkan perkembangan ekonomi domestik dan internasional tersebut, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan berfluktuasi pada Rp. 12.500 per dolar AS pada tahun 2015.

e. Inflasi

Inflasi yang rendah dan stabil merupakan prasyarat utama bagi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Untuk mencapai kondisi tersebut, di tengah kuatnya tekanan inflasi yang bersumber dari berbagai faktor

eksternal dan faktor internal, diperlukan kebijakan yang tepat demi terjaganya stabilitas ekonomi makro dan pengendalian inflasi ke depan. Koordinasi kebijakan antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil semakin ditingkatkan baik di level pusat maupun daerah.

Koordinasi tersebut dilakukan dalam bentuk pemantauan perkembangan harga, pasokan, dan distribusi dari beberapa komoditas strategis, serta menetapkan kebijakan dan langkah antisipasi yang cepat dan tepat dari kemungkinan terjadinya gejolak harga. Melalui koordinasi yang semakin luas dan terpadu tersebut, diharapkan kestabilan harga barang dan jasa dapat tercapai dan terus dipertahankan.

Pembangunan ekonomi nasional juga terus diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi seiring dengan membaiknya investasi sehingga diharapkan dapat memenuhi peningkatan kebutuhan nasional dan memperkecil *output gap*. Dalam rangka mendukung peningkatan kapasitas produksi serta pemerataan pembangunan nasional, pemerintah berencana untuk menerapkan strategi kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur. Percepatan pembangunan infrastruktur dibutuhkan dalam rangka menopang kelancaran arus distribusi kebutuhan masyarakat, baik dalam maupun antar pulau di Indonesia. Dalam kaitan ini, Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan alokasi pendanaan infrastruktur, antara lain dengan melakukan penajaman alokasi belanja, dari belanja subsidi untuk ditambahkan pada kegiatan pembangunan infrastruktur. Dengan terjaganya tekanan harga dari sisi permintaan dan penawaran, membaiknya infrastruktur dan kelancaran arus distribusi bahan kebutuhan pokok masyarakat, serta nilai tukar rupiah yang stabil, diharapkan dapat menjaga agar laju inflasi berada pada level yang rendah dan stabil, konvergen dengan laju inflasi negara-negara kawasan. Dengan berbagai sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia tersebut, didukung dengan koordinasi yang semakin mantap, serta memerhatikan perkembangan ekonomi domestik dan dunia, inflasi tahun 2014 diperkirakan berada pada kisaran 5,5 persen.

f. Suku Bunga SPN 3 Bulan

Berakhirnya stimulus moneter oleh the Fed pada quantitative easing (QE3) pada akhir oktober 2014 menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan tingkat suku bunga obligasi Pemerintah Indonesia. Tingkat obligasi pemerintah dengan tenor 5, 10, dan 30 tahun terlihat mengalami tekanan sejak pertengahan tahun 2013 dan terus berlanjut hingga tahun 2014. Selain faktor global, tingkat suku bunga obligasi pemerintah mengalami peningkatan yang disebabkan oleh tekanan yang bersumber dari faktor domestic seperti kenaikan laju inflasi.

Walaupun menghadapi tekanan, namun ketertarikan investor terhadap obligasi pemerintah masih tetap tinggi. Hal tersebut terlihat dari kepemilikan asing yang terus meningkat pada surat berharga Negara (SBN) yang dapat diperdagangkan (tradable). Porsi kepemilikan asing pada SBN tradable pada 12 desember 2014 tercatat mencapai 38,6 persen dengan nilai nominal sebesar Rp. 470,0 triliun atau lebih tinggi disbanding posisinya pada akhir tahun 2013 yang mencapai 32,5 persen dengan nominal Rp. 323,9 triliun.

Tekanan terhadap suku bunga obligasi juga tercermin pada obligasi Negara dengan tenor pendek, seperti Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan juga mengalami hal serupa. Rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan hingga akhir tahun 2013 mencapai 4,5 persen, lebih tinggi dari rata-rata tingkat suku bunga pada tahun sebelumnya yang mencapai 3,2 persen. Walaupun tekanan terus berlanjut di tahun 2014, namun rata-rata tingkat suku bunga SPN 3 bulan dapat dikendalikan di tingkat 5,8 persen atau lebih rendah dibandingkan proyeksi APBN 2014 sebesar 6,0 persen. Pada tahun 2015 isu rencana kenaikan suku bunga AS akan mendorong persaingan likuiditas pasar global dan akan memberikan tekanan pada suku bunga SPN 3 bulan yang diperkirakan pada kisaran 6,2 persen, sedikit lebih tinggi pada asumsi APBN tahun 2015 yang sebesar 6,0 persen.

3.2 Asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Laju Pertumbuhan Penduduk

Sebagai daerah yang sedang membangun, jumlah penduduk Kabupaten Natuna akan selalu berkembang dinamis. Menurut Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 penduduk Natuna 69.003 jiwa, dan Tahun 2011 sebanyak 72.950 jiwa bertambah sebesar 3.947 jiwa. Tahun 2012, Jumlah penduduk berjumlah 76.305 jiwa. Sedangkan pertumbuhan penduduk pada tahun 2013 berjumlah 76.897 jiwa.

Penduduk Kabupaten Natuna Tahun 2012 paling banyak menempati Kecamatan Bunguran Timur yaitu 26.137 Jiwa (34,25 persen) dan Kecamatan Bunguran Barat yaitu 11.716 Jiwa (15,35 persen), sisanya tersebar di kecamatan lainnya.

Jumlah penduduk Kabupaten Natuna diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun yang akan datang, hal ini akan berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran dan kemiskinan. Untuk mengatasi itu perlu dilakukan penyerapan tenaga kerja semaksimal mungkin.

b. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat terjadinya aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Peningkatan PDRB dengan mengestimasi menggunakan harga konstan sesuai dengan tingkat harga pada tahun dasar yang ditetapkan dapat menunjukkan perkembangan ekonomi secara riil. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Natuna menunjukkan tren kecenderungan meningkat setiap tahunnya.

Besaran nilai PDRB dapat menentukan struktur perekonomian suatu daerah. Struktur perekonomian tersebut menunjukkan besarnya kontribusi masing-masing sektor ekonomi, dengan mengamati struktur perekonomian akan tampak seberapa besar kekuatan ekonomi suatu negara atau daerah. Indikator makro sangat penting bagi pengambilan keputusan untuk menentukan arah dan sasaran kebijakan pembangunan di yang akan datang.

Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan sektor-sektor ekonomi dalam menciptakan nilai tambah. Hal tersebut juga menunjukkan ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan produksi dari setiap sektor ekonominya. Makin besar nilai tambah yang dapat diraih oleh suatu sektor maka semakin besarlah peranannya dalam perekonomian daerah tersebut. Besaran peranan masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut.

Tabel.6
Distribusi Persentase PDRB
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kabupaten Natuna Tahun 2009- 2013 (%)

Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
1. Pertanian	62,04	58,1	60,53	58,12	55,31
2. Pertambangan & Penggalian	0,43	0,44	0,41	0,43	0,41
3. Industri	2,19	2,16	1,92	1,96	1,8
4. Listrik, Gas dan Air	0,10	0,13	0,08	0,11	0,12
5. Bangunan	5,16	6,2	6,8	7,5	8
6. Perdagangan, Hotel & Restoran	16,13	17,53	15,33	15,96	16,85
7. Pengangkutan & Komunikasi	4,21	5,83	6,43	7,44	8,62
8. Keuangan & Jasa Perusahaan	2,89	2,97	2,67	2,64	2,86
9. Jasa-jasa	6,85	6,64	5,82	5,83	6,04
P D R B	100	100	100	100	100

Sumber: Natuna Dalam Angka

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa sektor yang paling dominan dan berandil besar dalam PDRB Kabupaten Natuna adalah sektor pertanian dengan *share* rata-rata 58,82 persen pertahun dengan kecenderungan yang semakin menurun. Dalam sektor pertanian, subsektor perikanan merupakan sektor unggulan yang memberi kontribusi terbesar. Peranan terbesar kedua

setelah sektor pertanian dalam hal penciptaan nilai tambah di Kabupaten ini adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan pembagian rata-rata 16,26 persen pertahun dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Pertahun, walau pada tahun 2011 mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 2,2 persen. Sedangkan peran terbesar ketiga ditempati sektor pengangkutan dan komunikasi. Sektor ini dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup besar yaitu dari 7,44 persen pada tahun 2012 menjadi 8,62 persen pada tahun 2013. Hal ini tidak lepas dari adanya program pemerintah daerah yang mencoba untuk melengkapi infrastruktur sarana dan prasarana daerah, seperti pembangunan jalan dan jembatan juga pembangunan lainnya. Peranan terbesar keempat ditempati oleh sektor bangunan dengan kecenderungan yang semakin meningkat dari 6,2 persen pada tahun 2010 menjadi 6,8 persen pada tahun 2011 dan naik menjadi 8 di tahun 2013 atau dengan *share* rata-rata 6,53 persen pertahun, dimana subsektor pemerintahan umum memberikan sumbangan terbesar pada sektor ini.

Dan kontribusi sektor terkecil di Kabupaten Natuna masih di sektor listrik, gas, dan air bersih yang hanya memiliki *share* rata-rata 0,10 persen pertahun.

Nilai PDRB perkapita merupakan gambaran nilai tambah bruto yang di ciptakan oleh setiap penduduk di suatu daerah sebagai akibat adanya proses produksi dalam rangkaian kegiatan ekonomi. Sementara itu pendapatan regional perkapita memberikan gambaran mengenai pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai balas jasa keikutsertaannya dalam proses produksi.

Besaran ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Kedua indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Dengan melihat pertumbuhan ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk dapat dilihat peningkatan dalam pendistribusian PDRB per kapita maupun pendapatan regional per kapita. Salah satu tujuan tingkat kemakmuran dalam pencapaian

pembangunan nasional dan regional adalah meningkatkan pendapatan masyarakat yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat yang disertai dengan pengurangan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan dengan cara meningkatkan mutu pendidikan dan juga perbaikan derajat kesehatan, sehingga dapat tercapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. PDRB dan pendapatan regional perkapita menjadi salah satu tolak ukur dalam pencapaian tingkat kemakmuran rakyat tersebut.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN DAERAH

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka sumber pembiayaan pembangunan daerah secara umum dapat dikelompokkan kepada 4 (empat) jenis yakni :

a. Dana Perimbangan yang terdiri dari:

1. Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam;
2. Dana Alokasi Umum;
3. Dana Alokasi Khusus;

b. Pembiayaan yang bersumber dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran
2. Penerimaan pinjaman daerah
3. Dana cadangan daerah
4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

4.1 KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Besar kecilnya PAD akan sangat tergantung pada kondisi dan potensi ekonomi daerah. Disamping itu, tingkat efektivitas dan efisiensi aparatur keuangan daerah turut pula menentukan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Natuna pada Tahun 2016 semaksimal mungkin dan di tambah dengan dana perimbangan berupa Dana bagi hasil yang meliputi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan atas

Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Penghasilan serta dana bagi hasil dari Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Namun upaya optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah tetap dilakukan. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut.

a. Kebijakan Internal

- Peningkatan pendapatan asli daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber PAD serta membentuk Tim Intensifikasi PAD
- Peningkatan jumlah penerimaan dari PBB dan membentuk Tim SISMIOP PBB
- Peningkatan pengetahuan dan keterampilan aparatur pemerintahan dalam pelaksanaan tugas
- Pengadaan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat mendukung upaya peningkatan PAD
- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah dan *up dating* data base wajib pajak (aktif dan non aktif)
- Terlaksananya monitoring dan evaluasi pembukuan dinas dan kecamatan
- Melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi terkait
- Menyusun Perda dan standar penghitungan penerimaan retribusi serta melakukan koordinasi dengan pihak legislative dan SKPD penghasil.

b. Kebijakan Eksternal

- Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dengan upaya sebagai berikut.
 1. Penyuluhan pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan kesadaran wajib pajak,
 2. Optimalisasi pendapatan wajib pajak dan wajib retribusi,
 3. Optimalisasi pungutan dan penagihan pajak terhutang,
 4. Penyusunan potensi pendapatan pajak daerah Kabupaten Natuna,
 5. Prosedur, teknik dan tata cara perhitungan dan penetapan wajib pajak retribusi dalam rangka peningkatan PAD.
- Peningkatan dan Pengembangan PBB
 1. Pendataan dan pemetaan objek, subjek dan reklasifikasi PBB bagi hasil pajak dan bukan pajak.
 2. Peningkatan sisdu penagihan PDRD dan PBB,
 3. Operasional pemungutan PBB,
 4. Aplikasi teknis pemungutan, pemeriksaan, sisdu administrasi pemungutan,
 5. Sosialisasi dan himbauan PDRD dan PBB,
 6. Pelaksanakan pemutakhiran dan updating data PBB,
 7. Sosialisasi UU terkait dengan PBB,
 8. Terlaksananya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat.

Terdapat beberapa upaya pemerintah daerah dalam mencapai target kebijakan pendapatan pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- ✓ Pendataan potensi PAD, subjek dan objek pajak serta retribusi daerah
- ✓ Melakukan sosialisasi dan penyuluhan sadar pajak kepada seluruh potensi objek pajak
- ✓ Pemberian *reward* atau penghargaan kepada wajib pajak yang taat
- ✓ Rapat koordinasi dan evaluasi pendapatan daerah dengan SKPD penghasil

- ✓ Penyempurnaan prosedur administrasi dalam pembayaran pajak dan retribusi

4.2 BELANJA DAERAH

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Tujuan penggunaan anggaran berbasis kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam penetapan anggaran khususnya menyangkut Belanja Daerah adalah sebagai berikut.

- a. Penyusunan anggaran belanja dengan prinsip pengalokasian dan pemanfaatan uang daerah secara efektif dan efisien, serta standar kinerja yang jelas (*standard performance measurement*) sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah disusun dan ditetapkan.
- b. Penggunaan belanja daerah diupayakan untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan perbaikan pelayanan masyarakat.
- c. Belanja Daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur kinerja yang terukur sampai dengan indikator hasil dan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, program dan kegiatan.

4.3 PEMBIAYAAN

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan

(SILPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, serta penerimaan kembali pemberian pinjaman dan pengeluaran pembiayaan yang terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit APBD

Tabel. 8. Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Pada APBD Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Natuna (Lampiran)

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
TARGET PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016**

NO	PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	TARGET ANGGARAN TAHUN BERKENAN	DASAR HUKUM
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	43.823.895.879	
4.1.1.	Hasil Pajak Daerah	5.035.000.000	Perda Nomor 1 Tahun 2011
4.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	546.500.000	Perda Nomor 8 Tahun 2013
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.000.000.000	Realisasi Deviden 2015
4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Dipisahkan	33.242.395.879	Targer Deposito dan Target BLUD
4.2	Dana Perimbangan	925.683.424.387	
4.2.1.	Bagi Hasil Pajak	212.395.191.441	Perpres 36 Tahun 2014
	Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	466.261.052.301	Perpres 36 Tahun 2014
4.2.2.	Dana Alokasi Umum	145.433.895.000	Perpres 36 Tahun 2014
4.2.3.	Dana Alokasi Khusus	101.593.285.645	Perpres 36 Tahun 2014
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	149.913.725.555	
4.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Propinsi	53.382.879.557	Pergub 403 Tahun 2014 dan Estimasi Tunda Salur
4.3.5.	Dana Transfer Lainnya	28.188.474.790	Perpres 36 Tahun 2014
4.3.6.	Dana Desa	39.531.902.000	PMK 93/PMK.07/2015
4.3.7.	Bantuan Keuangan Dari Propinsi	28.810.469.208	Estimasi Taskin 2015
	JUMLAH PENDAPATAN	1.119.421.045.821	
6.1.	Penerimaan Pembiayaan		
6.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	0,00	

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA PEGAWAI,
BUNGA, SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI
HASIL, BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
5.1.1.	Belanja Pegawai	346.545.464.507
5.1.3.	Belanja Subsidi	49.082.211.207
5.1.4.	Belanja Hibah	19.567.000.000
5.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	47.125.000.000
5.1.6.	Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	558.170.000
5.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/ Kabupaten/ Kota Dan Pemerintah Desa dan Partai Politik	122.440.917.000
5.1.8.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000
	JUMLAH PLAFON ANGGARAN SEMENTARA	586.318.762.714

PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016

NO	URAIAN	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp.)
6.	PEMBIAYAAN	0,00
6.1	Penerimaan Pembiayaan	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	0,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	0,00

BAB.V PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KU-APBD) Tahun 2016 merupakan pedoman dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah Tahun 2011 - 2016. Dalam Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 ini berisi petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Natuna dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna yang berfungsi sebagai pedoman akan acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Dalam rangka menjamin terwujudnya sinergitas pelaksanaan Kebijakan Umum APBD Tahun 2016, perlu dilakukan pengelolaan pembangunan yang membutuhkan disiplin perilaku amanah pada semua tingkatan. Sehingga demikian diharapkan dapat tercapainya sasaran efektif dan efisien, dan akhirnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna segera menjadi kenyataan sesuai dengan tujuan, sasaran dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rancangan Kerja Pemerintah Daerah.

Guna menjabarkan Kebijakan Umum APBD Tahun 2016 akan ditindak lanjuti dengan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Natuna Tahun 2016.

Demikian rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016 disusun dan selanjutnya dibahas untuk disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2016.